

# PRAKARSA PERDAMAIAN

Abd Moqsith Ghazali

Staf Pengajar Departemen Filsafat dan Agama Universitas Paramadina Jakarta  
& Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar PP Lakpesdam NU Jakarta

Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam kedamaian itu secara total (QS. Al-Baqarah [2]: 208).

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. (Khotbah di Bukit, Matius 5: 9).



kerusuhan inter-etnis ini disebabkan oleh kian termarginalkannya suku Dayak dalam proses-proses pembangunan.

Dalam perkembangan berikutnya, di areal lain, konflik antar suku di tanah Papua yang bagai api dalam sekam, tak pernah bisa dituntaskan hingga sekarang. Tak

jelas, apa yang menjadi motif utama bagi meletusnya konflik etnis dan kesukuan semacam ini. Sejumlah asumsi bermunculan, misalnya mulai dari soal perebutan sumber-sumber daya ekonomi hingga soal agenda politik kekuasaan. Tak juga terkuak, siapa yang sebenarnya menjadi *master mind* atau aktor dari konflik kesukuan itu.

Di samping itu, kerusuhan, ledakan bom, dan pembakaran rumah-rumah ibadah menjadi fenomena di beberapa daerah. Di Kupang, 30 November 1998, terjadi kerusuhan selama 3 hari, meluas hingga ke So'e dan pulau Rote. Sejumlah bangunan milik umat Islam seperti masjid, sekolah, asrama haji, dan perumahan menjadi sasaran kemarahan kalangan Kristen di sana. Bukan hanya di luar Jawa, kerusuhan juga meletus di daerah-daerah yang dikenal damai dan tenteram. Misalnya, kerusuhan Situbondo pada 10 Oktober 1996 yang menyebabkan beberapa gedung gereja dan sekolah Kristen

Indonesia adalah negeri dengan konflik dan kerusuhan yang tak kunjung henti. Aksi kekerasan yang melibatkan elemen masyarakat dan sebagian warga negara itu hampir merata di seluruh kawasan Indonesia terutama pada akhir tahun 1990-an, saat hendak memasuki Orde Reformasi yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto. Ada konflik yang melibatkan satu etnis tertentu dengan etnis yang lain, seperti konflik antara etnis Madura dan Dayak yang meletus di Pontianak dan Palangkaraya beberapa tahun lalu. Banyak orang Madura yang mati terbunuh, dan sebagian yang lain coba menyelamatkan diri dengan eksodus ke barak pengungsian bahkan hijrah ke tanah leluhurnya, pulau Madura. Sempat beredar di internet, foto-foto penjagalan etnis Madura yang memerindingkan bulu kuduk. Sebuah analisa menyebutkan bahwa

terbakar; kerusuhan Tasikmalaya pada 26 Desember 1996 yang juga berdampak pada terbakarnya sejumlah gereja, vihara, kelenteng, dan lain-lain; kerusuhan Rengasdengklok pada 23 Mei 1997 yang berakibat pada terbakarnya sejumlah tempat ibadah. Walau kadang pemicu awal kerusuhan tak memiliki sangkut paut dengan orang-orang Kristiani, hampir selalu gedung-gedung gereja menjadi sasaran amuk dan kemarahan. Dalam sejumlah kasus, kerap terjadi deviasi dan pembelokan arah dari satu soal ke soal lain. Lain yang gatal, lain pula yang digaruk.



Dalam menanggapi serentetan kerusuhan di kantong-kantong NU itu, PBNU yang saat itu dipimpin KH Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan menarik. Menurutnya, rentetan kekerasan yang berujung pada pembakaran tempat ibadah ini bukan soal teologi, melainkan soal ekonomi-politik. Dalam *tawshiyahnya* pada 30 Desember 1996, PBNU menegaskan bahwa serangkaian kekerasan tersebut merupakan cermin dari rasa ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat kecil karena melihat kesenjangan sosial serta marginalisasi ekonomi-politik. Gus Dur mengendus aroma politik di balik kerusuhan itu. Baginya, peristiwa Situbondo dan Tasikmalaya merupakan hasil rekayasa sejumlah elite di Jakarta yang hendak menghancurkan NU dan dirinya, yang disebutnya sebagai "Operasi Naga Hijau". Menurut Gus Dur, umat kerap diperalat kelompok elite tertentu untuk memuluskan jalan menuju singgasana kekuasaan politik. Gus Dur tampaknya coba menepiskan faktor internal menyangkut kognisi umat Islam yang kerap mengandung

prasangka-prasangka tidak benar mengenai umat dan tempat ibadah agama lain.

Dalam era reformasi pun, konflik bukan kian berkurang, melainkan justru tumbuh dengan subur dan kian meluas eskalasinya. Misalnya, [1] di Poso, konflik antara kaum Muslim dan Kristen berlangsung mulai tahun 1998-2006. Beberapa kali jeda terutama setelah ditandatanganinya Deklarasi Malino I tanggal 20 Desember 2001. Namun, konflik meletus kembali pada beberapa bulan berikutnya. [2] Konflik di Ambon dan Maluku mulai 1999-2002. Terkait dengan konflik ini, salah satu organisasi radikal Islam, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) menyatakan pada bulan Agustus 1999 bahwa berpartisipasi dalam perang di Ambon merupakan bentuk jihad bagi umat Islam. Sebuah organisasi Laskar Jihad yang dipimpin Ja'far Umar Thalib memimpin jihad di sana. Ribuan orang meninggal dunia. Konflik yang melibatkan kelompok

Islam dan Kristen ini terhenti dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino II pada tanggal 12 Pebruari 2002. Namun, beberapa saat kemudian, sebagaimana di Poso, konflik meletus kembali.

Wajah reformasi juga diperburam oleh terjadinya sejumlah ledakan bom. Misalnya, pada tanggal 19 April 1999, masjid Istiqlal Jakarta di bom oleh kalangan Islam garis keras; ledakan bom pada malam natal, 24 Desember 2000, terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Namun, yang paling fenomenal adalah bom yang meletus di Jalan Legian Kuta Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002. Serangan di Sari Club dan Paddy's Bar itu menewaskan 202 orang; 88 adalah warga negara Australia dan 38 warga negara Indonesia. Dan 200 orang terluka. Para pelaku pemboman telah membunuh orang-orang yang tak sedang dalam keadaan berperang, bahkan juga anak-anak yang sedang bermain-bergembira. Naifnya, mereka tak memandang perbuatan itu sebagai kriminal. Mereka biasanya berargumentasi bahwa pemboman sengaja dilakukan sebagai upaya bela diri, perjuangan kehormatan, dan misi penyadaran. Bali yang suka dikunjungi para bule sengaja dibom sebagai metafor dan simbol perlawanan atas musuh. Karena itu, mereka tak menyebut gerakannya itu sebagai teror sebagaimana disebut banyak orang, melainkan sebagai jihad untuk menegakkan hukum Allah. Di atas gundukan jenazah para korbannya, mereka seakan bisa merenggut kehormatannya kembali.

Penting dicatat, bahwa penyerangan kerap tak ditujukan kepada kelompok atau umat agama lain, melainkan juga terhadap sekelompok umat dalam suatu agama. Ini

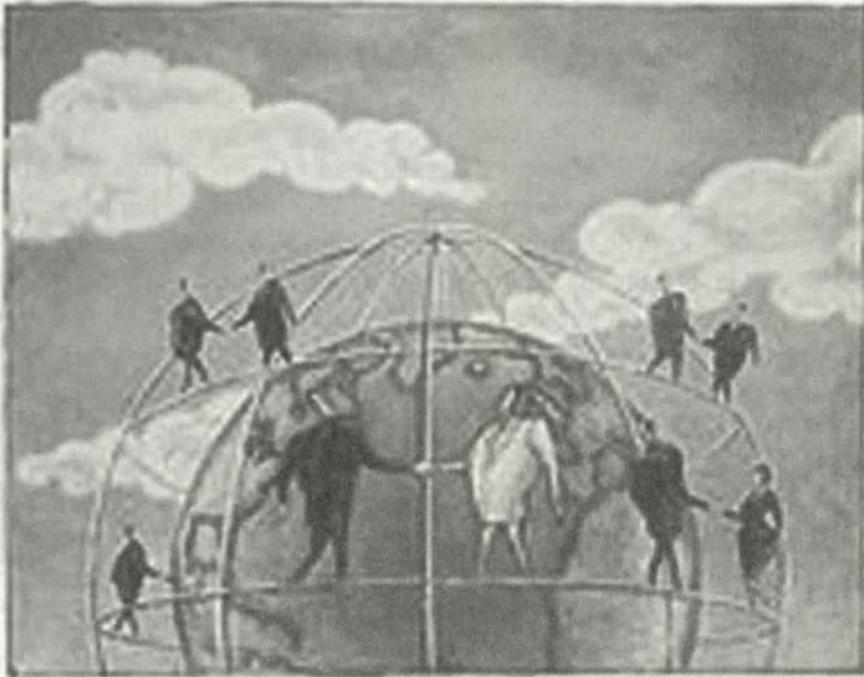
misalnya yang terjadi pada Jaringan Islam Liberal, Komunitas Lia Eden, dan Jemaat Ahmadiyah. Setelah MUI menegaskan kembali fatwa tentang sesat dan menyesatkannya ajaran Ahmadiyah, maka sejumlah umat Islam melakukan penyerangan fisik terhadap orang-orang Ahmadiyah, pengrusakan rumah-rumah kediaman Jemaat Ahmadiyah, penyegelan terhadap rumah ibadah dan gedung-gedung sekolah milik organisasi Ahmadiyah. Bahkan, sebagian di antara tokoh agama Islam memperlakukan harta benda milik Ahmadiyah sebagai barang *ghanimah* yang bisa dibagi di kalangan umat Islam lain.

Ini sungguh sebuah ironi. Pembunuhan dan penghancuran dianggap sesuatu yang sah dan valid dilakukan. Mereka melakukan pengrusakan atas nama nilai-nilai yang mereka susun sendiri, dan dengan itu mereka tidak memvonis dirinya telah melakukan kejahatan. Alih-alih merasa bersalah, mereka justru meminta agar Jemaat Ahmadiyah mengubah keyakinannya yang dianggap sesat itu. Atau mereka harus menyatakan diri keluar dari Islam. Kalau tidak, pemerintah diminta turun tangan untuk menengahkan mereka. Bahkan, sebagian kalangan menuntut Ahmadiyah untuk keluar dari tanah Indonesia. Ini bukan hanya merupakan pilihan problematis buat orang-orang Ahmadiyah, melainkan juga soal perampasan hak-hak asasi Jemaat Ahmadiyah. Bukankah konstitusi sudah memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada warganya. Tambahan pula, Jemaat Ahmadiyah bukanlah warga negara kelas dua yang boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Setiap orang boleh tak setuju terhadap tafsir dan keyakinan orang lain, termasuk terhadap Ahmadiyah. Tapi, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, ketidaksetujuan tak bisa membenarkan tindakan penghancuran atas orang lain. Sebagaimana madzhab-madzhab lain boleh tumbuh di negeri ini, begitu juga dengan Ahmadiyah. Selama sebuah mazhab tak mengajarkan dan menganjurkan tindakan kekerasan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, maka negara harus memberikan perlindungan terhadapnya. Perlindungan terutama wajib diberikan terhadap sekte-sekte kecil karena ia rentan mengalami kezaliman dan ketidak-adilan. Dalam suatu komunitas besar selalu ada komunitas kecil yang potensial dihegemoni, diintimidasi, dan diekskomunikasi. Karena itu, varian-varian kecil tersebut perlu diakui secara

eksistensial agar tak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak dominan dan mainstream.

Begitu juga seiring dengan demokratisasi di Indonesia, pemberlakuan UU Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, alih-alih menyelesaikan konflik, melainkan justru potensial melahirkan jenis konflik baru. Misalnya, perebutan kapling dan wilayah antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Lautan dibelah-belah berdasarkan batas teritorial daerah. Para nelayan bertengkar, karena nelayan yang satu menerobos batas lautan daerah lain. Tercipta sebuah anggapan bahwa nelayan yang satu tak boleh memasuki kawasan nelayan yang lain. Dengan otonomi daerah ini, peminggiran terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pendatang, bukan putera daerah, dianggap sah. Dengan otonomi



pro.corbis.com

daerah ini pula, muncul gagasan-gagasan penuh prasangka yang saling mengcounter. Ketika Aceh muncul dengan “Serambi Mekah” dan “Pemberlakuan Syari’at Islam”, maka di Minahasa sempat tercetus gagasan untuk menjadikan Minahasa dan Sangir Talaud (Minasatal) sebagai “Serambi Yerusalem” dan tuntutan untuk memberlakukan *The Ten Commandments*. Persis di sini, otonomi daerah menciptakan geopolitik kedaerahan, sehingga potensial menghilangkan Indonesia dalam memori kolektif bangsa.

Bersamaan dengan itu, kini mulai muncul perebutan simbol dan identitas-identitas lokal kedaerahan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik yang lain lagi. Misalnya, apakah rumah gadang di Minangkabau itu merupakan milik orang Minang secara keseluruhan apapun latar belakang agamanya? Ataukah ia merupakan milik orang Islam Minang, sehingga orang Minang yang non-Islam tak boleh menggunakannya apalagi mendesain rumah-rumah ibadah mereka dengan model rumah gadang. Hal yang sama juga akan terjadi di daerah-daerah lain, seperti bangunan pura di Bali, atau rumah Toraja di Toraja. Bagaimana sekiranya orang Islam di Bali membangun masjid dengan arsitektur pura, atau orang Hindu-Budha di Toraja membangun pura dengan model rumah Toraja. Soal-soal seperti ini muncul karena agama tertentu telah identik dengan suku tertentu. Misalnya Madura selalu identik dengan Islam, Bali dengan Hindu, Manado dengan Kristen, Gorontalo dengan Islam, Flores dengan Katolik, dan sebagainya. Seakan kita tak pernah bisa membayangkan ada orang Gorontalo yang

Kristen. Atau orang Flores yang Islam.

Jelas bahwa konflik muncul dengan motif yang tak tunggal. Di samping ada motif-motif sosial ekonomi, dan politik kekuasaan, mungkin juga ada soal teologis yang menyungkupinya. Pada mulanya ada persetujuan ekonomi politik, yang kemudian diberi bumbu teologi untuk mendramatisasi terjadinya konflik. Dengan berani, George J. Adjtjondro menyatakan bahwa konflik-konflik di kawasan timur Indonesia memang secara sepintas tampak konflik antar-etnis dan antar agama. Akan tetapi, menurutnya, rakyat kecil itu lebih merupakan korban dari kepentingan ekonomi dan politik para militer di sana. Entahlah! Tapi, pertanyaannya mungkinkah kedamaian-perdamaian bisa digelar?

### Menuju Perdamaian

Berlarut-larutnya berbagai konflik kesukuan, agama, dan ras menunjukkan bahwa bangsa ini belum siap hidup dalam rumah pluralitas. Pluralitas masih dianggap sebagai ancaman sehingga perlu diwaspadai, dan kalau perlu diterbitkan sebuah fatwa agama tentang sejumlah sekte-sekte atau kelompok-kelompok keyakinan dalam masyarakat sebagai menyimpang, sesat dan menyesatkan. Pluralitas juga dianggap sebagai ancaman bagi penguasaan lahan-lahan ekonomi-sosial-politik, karena dengan adanya “yang lain” maka satu kelompok diminta untuk berbagi kapling dengan “yang lain” itu. Potensi-potensi konflik ini akan mudah meletus sekiranya ada momentum, terlebih kalau ada provokasi tambahan dari luar.

Berbagai kekerasan dan konflik terus menumpuk, sementara upaya-upaya penye-

lesaiannya belum menampakkan hasil. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan konflik dan bagaimana pula mengatasi tindak kekerasan dan kerusuhan sosial di negeri ini. Cara penyelesaiannya bisa dilakukan dengan dua level; bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek misalnya; *pertama*, dengan mengaktifkan kembali perangkat-perangkat kebudayaan lokal yang di(hancur)kan pada zaman Orde Baru. Sebab, penyelesaian konflik tak selalu muncul dari gagasan atau narasi-narasi besar. Amat boleh jadi, penyelesaian justru bisa dilakukan dengan resep-resep kecil, seperti kearifan lokal. Artinya, *blue print* penyelesaian konflik tak bisa dipaket dari Jakarta, tanpa melihat kondisi obyektif lokalitasnya, mulai dari latar belakang historis, warisan sejarah, hingga situasi sosial-politik kontemporer daerah itu. Kita tahu bahwa ada potensi-potensi lokal (modal sosial dan kultural) yang bisa dipakai untuk membangun perdamaian. Di Maluku, ada adat *pela gandong*. Orang Ambon punya semboyan, "*torang samua basudara, so itu baku-baku bae*" [kita semua bersaudara, karena itu saling mengasihi].

*Kedua*, pemerintah dan aparat keamanan perlu bertindak proaktif untuk mencegah agar konflik tak berlangsung. Selama ini, aparat keamanan dinilai lemah dalam melakukan pencegahan. Alih-alih mau melakukan pencegahan, malah kuat dugaan—sebagaimana riset yang dilakukan George J Aditjondro—adanya keterlibatan militer dalam merawat sejumlah kerusuhan sosial di kawasan timur Indonesia demi sebuah bisnis dan kekuasaan. Di sebagian tempat, kerap kali aparat keamanan tampak

sebagai penonton ketika pengrusakan sedang berlangsung. Ini terlihat ketika pengrusakan terhadap kantor Ahmadiyah dilakukan oleh sejumlah orang, baik yang di Parung Bogor maupun yang di Lombok Nusa Tenggara Barat.

*Ketiga*, dengan cara menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap para pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Ketidakadilan dalam menegakkan hukum bukan hanya akan mendorong masyarakat melakukan tindakan "main hakim sendiri", melainkan juga memicu terjadinya konflik lanjutan. Keadilan bisa berjalan sekiranya aparat penegak hukum berposisi netral dengan tidak berpihak kepada salah satu pelaku kerusahan. Sebagai negara hukum, tak boleh ada kejahatan—siapapun pelakunya dan apapun tujuannya—yang bisa lepas dari jerat hukum di negara ini. Pemberian sanksi yang tegas dan berat kiranya akan memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang berseteru.

*Keempat*, meminta keterlibatan dan peran media dalam menciptakan damai di masyarakat. Media masa—baik cetak maupun elektronik, di pusat maupun di daerah—harus memberikan informasi yang berimbang, tak mendramatisasi peristiwa, dan tentu saja harus obyektif dan netral. Ini penting dilakukan, sebab informasi-informasi yang tersebar di media kadang menjadi acuan utama para pihak yang bertikai untuk menyusun langkah-langkah dan strategi penyerangan terhadap musuh. Dan tidak jarang, pemberitaan yang berat sebelah turut memperkeruh suasana konflik. Begitu juga, penayangan gambar-gambar konflik harus dilakukan secara hati-hati dan selektif, sehingga tidak turut membakar

emosi masyarakat.

Sementara strategi penyelesaian konflik yang bersifat jangka panjang, misalnya, memasukkan resolusi konflik dan *peace-building* ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, sejak dini. Kian tingginya potensi konflik di Indonesia, maka kian mendesak pula kebutuhan menjadikan resolusi konflik dan studi perdamaian menjadi bagian dari proses pembejaraan di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran ini berguna, bukan hanya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian, melainkan untuk memberikan keterampilan teknis perihal mengatasi konflik dan membangun perdamaian. Tanpa itu, mereka akan mengalami kegamangan demi kegamangan.

Selain itu, melakukan *state building* sesuai dengan kondisi obyektif Indonesia dengan aneka ragam latar belakang penduduknya. Misalnya, harus ditata kembali hubungan pusat dan daerah, dan bagaimana hubungan satu daerah dengan daerah lain mesti diselenggarakan. Harus dikukuhkan kembali tentang dasar bernegara dan berbangsa, sehingga kita tak menemukan kesimpang-siuran dasar; yang satu hendak menggunakan dasar agama, dan yang lain menggunakan yang lain lagi. Perlu diatur juga misalnya peraturan-peraturan daerah yang cenderung menimbulkan pertentangan dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Ketidajelasan relasi-relasi dan aturan itu, sebagaimana telah terbukti di lapangan, potensial menimbulkan konflik secara berkesinambungan; antara pusat dan daerah, satu daerah dengan daerah lain. Dalam kaitan ini, UU

Otonomi Daerah mesti diperbaiki kembali.

Sekiranya benar bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial turut memicu meledaknya konflik, maka secara sistematis dan terencana pemerintah perlu terus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menyediakan lapangan kerja; di antaranya dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses-proses pembangunan secara adil dan merata. Dengan cara ini, kecemburuan antara satu etnis dengan etnis yang lain, misalnya dalam soal eksplorasi dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam, dapat ditanggulangi. Jika kemakmuran dan kesejahteraan sudah merata, maka persesteraan bisa disumbat. Sebaliknya, jika ketimpangan ekonomi menganga dan angka kemiskinan terus naik, maka persesteraan tinggal menunggu momentum. Sebuah hadis benar ketika menyatakan bahwa kefakiran bisa menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, sehingga mudah melakukan anarki dan kejahatan (*kadal faqru an yakuna kufuran*).

Dengan langkah-langkah di atas, kiranya sedikit demi sedikit, kerusuhan dan perang yang melanda sebagian wilayah Indonesia ini bisa dikurangi. Sebab, kerusuhan bukan hanya bertentangan dengan akal sehat dan hukum yang berlaku, melainkan juga melanggar ajaran agama-agama yang dianut oleh warga bangsa Indonesia. Jika Al-Qur'an memerintahkan agar umat Islam masuk ke dalam damai secara total, maka Khotbah Yesus di atas bukit menegaskan bahwa barang siapa membawa damai, itulah anak-anak Allah. Setiap umat beragama mestinya mencamkan nubuat para nabinya. ❖